

Kedudukan dan kekuatan mengikat nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) ditinjau dari segi hukum perjanjian : analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1681/K/PDT/2011 = Legal standing and binding of memorandum of understanding analyzed from contract law : analysis on Supreme Court Decision No. 1681/K/PDT/2011

Abi Rafdi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330935&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

.....This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreement contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code.